

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DES) DESA TURUS KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019- 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Turus kecamatan Polanharjo Tahun 2019- 2025 merupakan dokumen perencanaan 6 (enam) tahun, disusun berdasarkan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

RPJM Desa disusun sebagai pedoman dan arah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa dan kewajiban desa, rencana kerja beserta indikasi pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJM Desa disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan desa dalam jangka waktu enam tahun. Rancangan RPJM Desa memuat Visi dan Misi Kepala Desa, Arah Kebijakan Pembangunan Desa, serta Rencana Kegiatan yang meliputi: bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Klaten

Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah dijelaskan bahwa RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJM Desa disusun sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), maka konsekuensi dari pelaksanaan atas pasal-pasal tersebut, rencana kerja, program dan kegiatan yang disusun dalam RPJM Desa harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan APBDes. RPJM Desa Turus Kecamatan Polanharjo Tahun 2019- 2025 merupakan integrasi antara program-program pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan desa) maupun swasta/masyarakat sebagai hasil penjaringan aspirasi yang telah diformulasikan melalui Musrenbang desa.

B. Landasan Hukum

Penyusunan RPJM Desa Turus Kecamatan Polanharjo Tahun 2019-2025 didasarkan pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

- 1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK/ Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- 17) Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- 18) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- 19) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 20) Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- 22) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 24) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

C. Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJM Desa Turus Kecamatan Polanharjo Tahun 2019-2025 sebagai berikut :

- a. Desa mempunyai Dokumen RPJMDesa yang memuat pedoman dan arah pembangunan desa dalam jangka waktu enam tahun, yaitu Tahun 2019-2025.
- b. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja pemerintah desa;
- c. Sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan ;
- e. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Klaten ;
- f. Terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga terciptanya efektifitasnya anggaran pendapatan daerah.

BAB II

PROFIL DESA

A. Legenda dan Sejarah Desa

1. Mengapa Dinamakan Desa Turus

Desa Turus merupakan penggabungan dua wilayah yang memiliki latar belakang kultur budaya masyarakat derajat sosial yang berbeda. Dua Wilayah tersebut yakni wilayah Kademangan Ngemplak (yang terdiri dusun *Mrisen*, *Ngemplak*, dan *Popongan*) dan wilayah dusun *Turus*. Kedua wilayah tersebut melebur terintegrasi menjadi satu kesatuan dengan nama Desa Praja Turus. Secara resmi berdirinya Desa Turus yang dikutib dari berbagai sumber sejarah bertepatan pada hari Jum'at Pon tanggal 4 mei 1934 menjelang akhir masa penjajahan Belanda, maka **tanggal 4 mei 1934** dinyatakan sebagai hari jadi Desa Turus. Catatan sejarah ini perlu diingat dan pantas dikenang oleh masyarakat Desa Turus.

Nama Desa Turus diambil dari nama dusun yang lebih tepat sesuai kondisi sosial. Kata orang jawa bahwa nama adalah doa yang mengandung maksud, harapan dan tujuan, bahwa Desa Turus memiliki makna dalam keratabasa bahasa jawa (*turus = pitutur ing margi kang lurus*) yang berarti nasehat (*pituduh*) menuju kejalan benar yang di ridhoi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kisah Berdirinya Desa Turus

Menurut para pinisepuh, bahwa asal mula berdirinya Desa Turus adalah diawali kisah keteladanan tiga serangkai orang tokoh panutan masyarakat yakni Demang Joyo Rejo, Lurah Wiryo Sukarto, dan Bekel Kriyo Manggolo. Demang Joyo Rejo tokoh adat di cakupan wilayah Ngemplak, Popongan dan Mrisen adalah orang yang memiliki dasar pendidikan ilmu pemerintahan cukup tinggi sebagai abdi dalem Kraton Surakarta. Lurah Wiryo Sukarto dikenal sebagai petani tekun sukses yang gemar belajar membaca dan suka berbagi ilmu yang dimiliki pada sesama. Beliau adalah orang yang sangat berpengaruh besar di wilayah Dusun Turus. Sedangkan Bekel Kriyo Manggolo memiliki bakat talenta tinggi dibidang budaya kesenian dan ilmu kanuragan, sehingga cukup disegani orang sekelilingnya. Bekel Kriyo Manggolo merupakan orang kepercayaan penjajah (*Belanda*) dengan tugas pokok menyediakan kuli/tenaga kerja tanpa upah untuk kepentingan pemerintah dan penjajah. Tetapi, Bekel Kriyo Manggolo orang yang welas asih dan suka membantu berpihak pada (*wong cilik*) rakyat kecil yang tertindas oleh belenggu penjajah.

Ketiga orang tersebut rukun berdampingan seperti saudara dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi. Berikut sekilas profil yang kami kutib dari berbagai sumber.

a. Demang Joyorejo

Demang Joyorejo merupakan bangsawan abdi dalem kraton Surakarta memiliki kemampuan yang tidak diragukan lagi. Ajaran yang diterima untuk menjadi seorang pemimpin yang baik harus bisa memegang dan memelihara suatu sistem pemerintahan yang bersih berwibawa dengan berpedoman, menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip sapta M. Prinsip-prinsip sapta M meliputi **Momong, Momot, Momor, Memet, Mapan, Mituhu dan Mitayani** yang sangat relevan untuk kehidupan masyarakat Jawa. Berikut penjelasan Sapta M.

- 1). **Momong**, artinya seorang pemimpin harus selalu tut wuri handayani (*membina dan membimbing bawahan/lingkungan masyarakat dengan sebaik-baiknya*).
- 2). **Momot**, artinya seorang pemimpin harus peka dan mampu menyerap aspirasi masyarakat serta dapat menerima saran atau pendapat dan tidak (*waton maido*) asal mencela.
- 3). **Momor**, artinya seorang pemimpin harus mampu (*manjing ajur ajer*) adaptasi baik dalam hubungan vertikal maupun horizontal.
- 4). **Memet**, artinya seorang pemimpin didalam mengambil keputusan harus melalui perhitungan yang matang, tidak boleh gegabah serta penuh pertimbangan manusiawi.
- 5). **Mapan**, artinya seorang pemimpin harus mempunyai ketahanan fisik dan mental yang kokoh.
- 6). **Mituhu**, artinya seorang pemimpin wajib memiliki loyalitas yang tinggi.
- 7). **Mitayani**, artinya seorang pemimpin harus dapat diandalkan kemampuannya, sehingga dapat pula menjadi tempat mengadu dan berlindung bagi bawahan ataupun masyarakat lingkungannya.

Seorang pemimpin harus mampu membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam gerak pembangunan. Bahwa pemerintah harus bersifat memimpin dan mengatur yang lebih ditekankan pada fungsi pembinaan dan pengayoman.

Selanjutnya sebagai abdi Negara harus dapat menyesuaikan diri baik dalam pola pikir, sikap maupun perilaku yang mampu mendorong kreatifitas memacu prestasi dan dapat membangun etos kerja. Dalam falsasah jawa harus dilandasi dengan konsep : **Tutur** (*mampu member bimbingan nasehat untuk menumbuhkan rasa percaya diri*), **Uwur** (*Selalu memperhatikan kesejahteraan bawahan*), **Sembur** (*memberi dorongan untuk mencapai puncak kebahagiaan hidup*).

b. Lurah Wiryo Sukarto

Lurah Wiryo Sukarto dikenal sebagai petani tekun sukses yang gemar belajar membaca dan suka berbagi ilmu yang dimiliki pada sesama. Beliau adalah orang yang sangat berpengaruh besar diwilayah Dusun Turus. Beliau menerapkan perhitungan pranoto mongso dalam hubungannya dengan iklim dan musim pertanian. Perhitungan pranoto mongso adalah bekal ilmu yang terperinci sesuai dengan gejala-gejala alam dan kehidupan. Perhitungan tersebut merupakan hasil pemikiran Sri Susuhunan Paku Buwono VII pada tahun 1855 yang dikenal sebagai 12 musim mongso.

- 1) **Mangsa kasa** (41 hari), jangka waktu dimulai tanggal 22 juni s/d 1 agustus ditandai adanya binatang kecil sebangsa belalang dan jangkrik mulai membuat rumah dalam tanah (*ngerong*), daun gugur menguning, para petani membakar damen disawah.
- 2) **Mangsa karo** (23 hari), jangka waktu dimulai tanggal 2 agustus s/d 24 agustus, ditandai tanah nelo, tumbuh polowijo, daun randhu dan mangga mulai bersemi.
- 3) **Mangsa ketiga** (24 hari), jangka waktu mulai tanggal 25 agustus s/d 17 september, ditandai tumbuhnya tanaman rempah-rempah(*kunyit, jahe, temu-temuan dll*) mulai musim panen polowijo.
- 4) **Mangsa kapat** (25 hari), jangka waktu dimulai tanggal 18 september s/d 12 oktober ditandai pohon randu berbuah dan burung-burung kecil bertelur, para petani mulai tanam padi.
- 5) **Mangsa kelima** (26 hari), jangka waktu dimulai tanggal 13 oktober s/d 8 nopember, ditandai pohon asem mulai bersemi, ulat dan sebangsanya mulai berkembangbiak.

- 6) **Mangsa kanem** (43 hari), jangka waktu dimulai tanggal 9 *nopember* s/d 21 *desember* ditandai panen buah-buahan, burung belibis mencari makan dirawa-rawa, petani mulai menyemai benih padi.
- 7) **Mangsa kapitu** (43 hari), jangka waktu dimulai tanggal 22 *desember* s/d 2 *februari* ditandai banyak hujan, sungai banjir dan petani mulai menanam padi.
- 8) **Mangsa kawolu** (26 hari), jangka waktu dimulai tanggal 3 *februari* s/d 28/29 *februari* ditandai tanaman padi mulai menghijau/berkembang, uret serangga keras berkeliaran.
- 9) **Mangsa kasanga** (25 hari), jangka waktu dimulai tanggal 1 *maret* s/d 25 *maret* ditandai tanaman padi mulai merkatak, jangkrik ngengkrik, dan kucing gandhikan berkembangbiak.
- 10) **Mangsa kadoso** (24 hari), jangka waktu dimulai tanggal 26 *maret* s/d 18 *april* ditandai tanaman padi sawah menguning, padi gogo lading panen, dan burung-burung kecil menetas.
- 11) **Mangsa desta** (23 hari), jangka waktu dimulai tanggal 19 *april* s/d 11 *mei* di tandai tanaman padi sawah mulai panen.
- 12) **Mangsa sada** (41 hari), jangka waktu dimulai tanggal 12 *mei* s/d 1 *juni* ditandai para petani menjemur padi, damen sawah mulai kering.

Perhitungan musim tersebut sangat berkaitan erat dengan petani. Selain itu, perhitungan musim juga berkaitan antara masyarakat jawa dengan alam dan lingkungannya. Dari situlah figur Wiryo Sukarto menghantar orang sekelilingnya dapat mengolah tanah dan mengelola hasil bumi yang melimpah dengan baik. Masyarakat juga selalu ditanamkan budaya hidup hemat setiti ngati-ati.

c. Bekel Kriyo Manggolo

Bekel Kriyo Manggolo merupakan orang yang memiliki bakat talenta tinggi dibidang budaya kesenian dan ilmu kanuragan. Bekel Kriyo Manggolo tidaklah berbeda jauh dengan Demang Joyorejo maupun Lurah Wiryo Sukarto walaupun sebagai Bekel dengan tugas pokok menyediakan kuli/tenaga kerja tanpa upah untuk kepentingan pemerintah dan penjajah. Akan tetapi, lebih welas asih dan suka

membantu berpihak pada (*wong cilik*) rakyat kecil yang tertindas oleh belenggu penjajah. Atas pengalaman yang didapat dari para kompeni berhasil mengenalkan tehnik olah tanah bercocok tanam dan pola tanam yang handal walaupun masih secara konvensional. Selain itu, Bekel Kriyo Manggolo juga mengetahui cara pengelolaan sistem irigasi yang teratur. Beliau juga mengenalkan alat-alat pertanian berupa cangkul, sabit, bendho, linggis dan garu-luku sehingga dapat meringankan pengolahan tanah. Ilmu pertanian yang diperkenalkan oleh Kriyo Manggolo lebih dominan dibanding bidang seni budaya kanuragan.

Kriyo Manggolo juga dikenal sebagai tokoh koreografi kanuragan seni tari/beksan, seni wayang orang, dan seni karawitan. Seni budaya tersebut menjadi identitas atau jatidiri desa Turus. Jadwal latihan setiap selapan jatuh pada hari selasa pahing. Pada setiap malam tanggal 1 suro digelar pementasan besar rutin di bangsal tegal ketos, dalam rangka tirakat mencari ide untuk melahirkan gagasan baru, bersedekah, syukur merti dusun, bersih dusun sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa dan cinta kasih kepada sesama manusia. Kesuksesan kesenian tari/beksan, wayang orang dan karawitan terkenal pentas tersebar dari panggung kepanggung dalam maupun luar kecamatan Polanharjo.

Atas dorongan motifasi yang ditumbuhkan dan dihayati sebagai kewajiban mutlak tertanam dalam karakter kepribadian tiga orang panutan tersebut, sehingga mampu menggairahkan kehidupan para petani. Motivasi ketiga kepribadian tersebut terukir dalam slogan yang digambarkan dan dilantunkan dalam tembang dhandhanggulo. Berikut lirik tembang dhandhanggulo yang menggambarkan karakter ketiga tokoh tersebut.

Jago kluruk rame kapiarsi
Lowo kalong luru pandhelikan
Jrih kawatan ing semune
Wetan bang sulakipun
Mratandhani yen bangun enjing
Rembulan wus gumlewang
Sakuloning gunung
Ing padesan wiwit obah
Lanang wadon pan samya anambut kardi
Netepi kuwajiban

Itu gambaran kilas keharmonisan penghidupan yang telah ditanamkan rasa tanggungjawab keluarga mulai sejak bangun subuh sudah mulai bekerja sebagai wujud pelaksanaan tugas kewajiban hidup warga Turus.

Dari tiga tokoh tersebut, pertemuan di Kali Pleret mengungkap gagasan untuk mempersatukan visi dan misi. Gagasan tersebut berupa pembangunan dan kemajuan dusun. Hasil dari gagasan ketiga tokoh tersebut kemudian diinformasikan pada warga. Akhirnya tercetus ide dari bekel Kriyo Manggolo meminta untuk dilaksanakan perundingan rembug dusun di Pendopo Rumah Wiryo Sukarto. Rembug dusun tersebut berlangsung selama 3(tiga) hari. Hasil perundingan, yaitu untuk mewujudkan kerukunan antar sesama sebagai kekuatan manunggal dalam penggabungan dari masing-masing dusun. Hasil perundingan tersebut bertepatan pada hari jum’at pon tanggal 4 mei 1934. Atas Berkah dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan dukungan segenap masyarakat yang dilandasi doa restu dan kesaksian para terkemuka maka tercapailah kesepakatan penggabungan dusun manunggal menjadi satu kesatuan dengan nama “DESA PRAJA TURUS”. Dari hasil tersebut sekaligus menunjuk Kriyo Manggolo menjadi Lurah Desa/Kepala Desa Praja Turus.

Ketika terjadi penataan dan perubahan peraturan Pemerintahan, sebutan Desa Praja diubah sebutan menjadi Desa dan berdirilah “Desa Turus”. Secara resmi dan ditandai pada hari jum’at pon 4 mei 1934 yang perlu dicatat dan di ingat oleh seluruh lapisan masyarakat. Berikut ini nama-nama pemangku jabatan Lurah/Kepala Desa di Desa Turus.

Lurah/Kades ke I	: Bp. Kriyo Manggolo	± (Th.1934 s/d 1943)
Lurah/Kades ke II	: Bp. Wiryo Sukarto	± (Th.1943 s/d 1951)
Pj.Lurah/Kades	: Bp. Darmobroto	± (Th.1951 s/d 1952)
Lurah/Kades ke III	: Bp. Mugi Prapto Raharjo	± (Th.1952 s/d 1966)
Pj.Lurah/Kades	: Bp. Darmobroto	± (Th.1966 s/d 1971)
Pj.Lurah/Kades	: Bp. Mulyono	± (Th.1971 s/d 1972)
Lurah/Kades ke IV	: Bp. Soebakir,BA	± (Th.1972 s/d 1988)
Pj.Lurah/Kades	: Bp. Mulyono	± (Th.1988 s/d 1989)
Lurah/Kades ke V	: Bp. Ngadiyo	± (Th.1989 s/d 1997)
Pj.Lurah/Kades	: Bp. Mulyono	± (Th.1997 s/d 1998)
Lurah/Kades ke VI	: Bp. Herdwi Atmanto, SH	± (Th.1998 s/d 2006)
Pj.Lurah/Kades	: Bp. H. Rohmad Sugiarto, SIP	± (Th.2006 s/d 2007)

Lurah/Kades VII	: Bp. Ir. Jatmiko	± (Th.2007 s/d 2013)
Lurah/Kades VIII	: Ibu. Sri Puji Rahayuningsih	± (Th.2013 s/d 2019)
Lurah/Kades IX	: Bp. Ir. Jatmiko	± (Th.2019 s/d Sekarang)

Letak Pusat Pemerintahan Desa Turus :

Rumah Bp.Kriyo Manggolo	:	Sebagai Kantor Desa ke I.
Rumah Bp. Wiryo Sukarto	:	Sebagai Kantor Desa ke II.
Rumah Bp.Mugi Prapto.R	:	Sebagai Kantor Desa ke III.

Kantor dan Balai Desa Turus mulai di bangun Bp.Mugi Prapto Raharjo pada Th.1962 dan diselesaikan oleh Bp. Darmobroto pada Th.1968.

B. Kondisi Umum Desa

1. Kondisi Geografis

Desa Turus secara geografis terletak pada 6° 51’ 46“ sampai dengan 7° 11’ 47“ LS dan 109° 40’ 19“ sampai dengan 110° 03’ 06“ BT. Secara geografis Desa Turus berada diketinggian tanah 650 M dpl dengan curah hujan 30 mm/th. Dengan ketinggian 650 M dpl Desa Turus termasuk dataran rendah dan suhu udara rata – rata 25° -28°C. Desa Turus merupakan salah satu desa di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Kabupaten Klaten, Kecamatan Polanharjo dengan batas desa sebagai berikut :

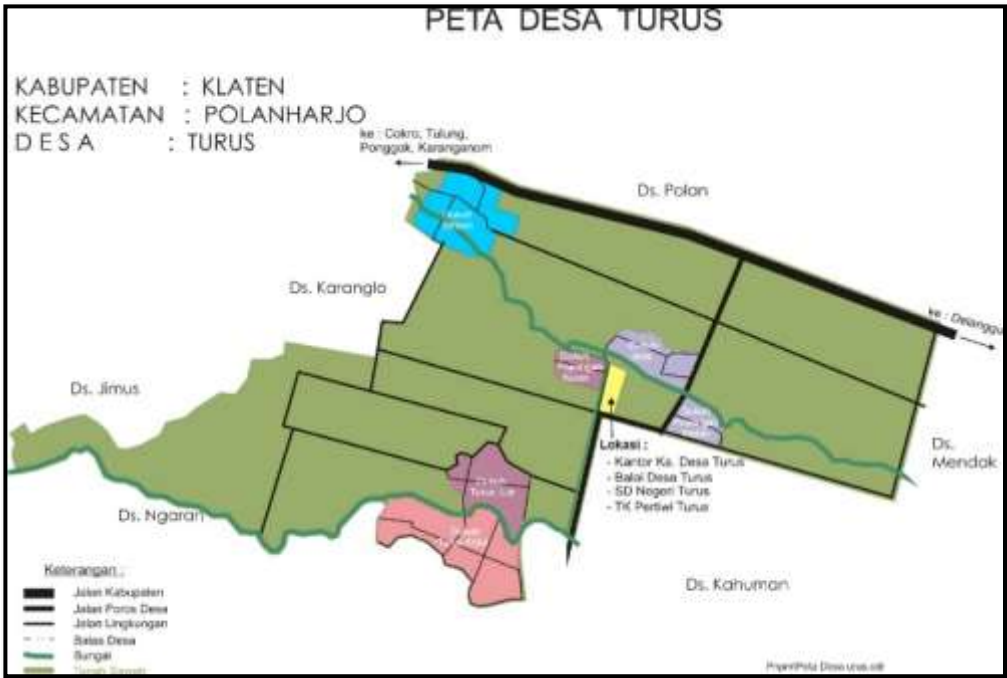
- Sebelah Utara : Desa Polan – Polanharjo – Klaten.
- Sebelah Timur : Desa Kahuman – Polanharjo & Desa Mendak – Delanggu.
- Sebelah Selatan : Desa Ngaran – Polanharjo – Klaten.
- Sebelah Barat : Desa Jimus – Polanharjo & Desa Karanglo – Polanharjo.

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Turus 118,2960 Ha merupakan desa yang berada di dekat pusat pemerintahan kantor Kecamatan Polanharjo yang terdiri dari :

1. Sawah	99, 1684 Ha
2. Tegalan, Kebun dan sarana umum	19, 1276 Ha
3. Pemukiman Penduduk.....	<u>16, 4833 Ha</u> +
Jumlah	118, 2960 Ha

3. Peta Desa



4. Desa Turus terbagi menjadi 4 (empat) RW dan 11(sebelas) RT yang meliputi :

NO	DUKUH	RW	RT	KETERANGAN
1	Mrisen	I	01	86 KK
2	Mrisen	I	02	108 KK
3	Jetis	II	01	52 KK
4	Jetis	II	02	56 KK
5	Pop.Wetan	II	03	50 KK
6	Pop.Kulon	III	01	28 KK
7	Turus Lor	III	02	60 KK
8	Turus Lor	III	03	62 KK
9	Turus Kidul	IV	01	72 KK
10	Turus Kidul	IV	02	63 KK
11	Turus Kidul	IV	03	59 KK
JUMLAH				696 KK

5. Peruntukan Lahan :

NO	PERUNTUKAN	LUAS (Ha)	KET.
1	Pertanian Subur	58. 2237	-
2	Pertanian Sedang	29.3492	-
3	Pertanian Tandus	7.2990	-
4	Irigasi	4.1781	-
5	Perumahan	16.4833	-
6	Olah raga	0.2352	-
7	Makam	1.6262	-
8	Tempat Ibadah	0.1870	-
9	Industri	0.0500	-
10	Pendidikan	0.6522	-
11	Kesehatan	0.0120	-

6. Jumlah Penduduk

- a. Jumlah Kepala Keluarga : 696 KK
- b. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin

Laki – laki	960	Orang
Perempuan	1. 051	Orang
Jumlah	2.011	Orang

- c. Jumlah penduduk menurut Dukuh :

NO	DUKUH	JENIS KELAMIN	
		Laki - laki	Perempuan
1	Mrisen	268	296
2	Jetis & Popongan Wetan	227	239
3	Popongan Kulon & Turus Lor	210	230
4	Turus Kidul	255	286
JUMLAH		960	1.051

d. Jumlah penduduk menurut pemeluk agama

Agama Islam	: 1.986
Agama Kristen	: 15
Agama Katolik	: 10
Agama Hindu	: -
Agama Budha	: -
TOTAL	: 2.011

e. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	200	209	409
2	MENGURUS RUMAH TANGGA		237	237
3	PELAJAR/MAHASISWA	139	160	299
4	PENSIUNAN	21	12	33
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	18	11	29
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	5		5
7	KEPOLISIAN RI	2		2
8	PERDAGANGAN	2	13	15
9	PETANI/PEKEBUN	20	8	28
10	PETERNAK	1		1
11	INDUSTRI	1	2	3
12	TRANSPORTASI	1		1
13	KARYAWAN SWASTA	136	112	248
14	KARYAWAN HONORER	3	4	7
15	BURUH HARIAN LEPAS	283	165	448
16	BURUH TANI/PERKEBUNAN	18	13	31
17	BURUH PETERNAKAN	1	1	2
18	PEMBANTU RUMAH TANGGA		1	1
19	TUKANG BATU	5		5
20	TUKANG JAHIT	1	1	2
21	MEKANIK	1		1
22	DOSEN		1	1
23	GURU	2	10	12
24	PERAWAT	1	3	4
25	APOTEKER		2	2

26	PELAUT	2		2
27	SOPIR	1		1
28	PEDAGANG	3	13	16
29	PERANGKAT DESA	5	1	6
30	KEPALA DESA	1		1
31	WIRASWASTA	40	17	57
32	LAINNYA	48	54	102
JUMLAH		961	1.050	2.011

f. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

NO	TINGAKATAN	JUMLAH	KET.
1	Tidak / Belum Tamat SD	358	
2	Belum Tamat SD	119	
3	Tamat SD	381	
4	Tamat SLTP	347	
5	Tamat SLTA	653	
6	Tamat Diploma I/ II	12	
7	Tamat Akademi/ Diploma III	47	
8	Tamat S1	91	
9	Tamat S2	3	
10	Tamat S3	-	

g. Jumlah penduduk menurut penderita cacat

NO	PENDERITA	JUMLAH	KET.
1	Tubuh	3	
2	Netra	5	
3	Mental	5	
4	Rungu	7	
5	Wicara	2	
6	Sumbing	1	

h. Kondisi Bangunan Dan Sarana Umum

- 1. Balai Desa : 1 buah luas 350 M²
- 2. Kantor Desa : 1 buah luas 120 M²
- 3. Pasar : -
- 4. Tempat Ibadah

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	Masjid	6	
2	Mushola	2	
3	Gereja	-	
4	Vihara	-	

5. Kesehatan

NO	SARANA	JUMLAH	KET.
1	Rumah Sakit	-	-
2	Puskesmas	-	-
3	Pustu	-	-
4	PKD	-	-
5	Polindes	1	Masih perlu peralatan/ perlengkapan pendukung
6	Bidan	1	-
7	Apotek	-	-
8	Klinik Kesehatan	-	-
9	Posyandu	6	4 Posyandu Balita, 2 Manula
10	Klinik Fisioterapi	1	-

6. Pendidikan

NO	SARANA	JUMLAH	KET.
1	Play Group	-	-
2	TK	2	1 rusak, 1 dalam perbaikan
3	SD/MI	2	1 baik, 1 rusak
4	SMP	-	-
5	SMA	-	-
6	SMK	-	-
7	PLS	-	-
8	TPA	5	3 baik, 1 rusak, 1 dalam perbaikan

7. Olah Raga

NO	SARANA	JUMLAH	KET.
1	Kolam Renang	-	-
2	Gedung Olah raga	-	-
3	Tenis Meja	3	2 baik, & 1 rusak
4	Lapangan Volly	4	2 baik, & 2 rusak
5	Lapangan Bulutangkis	3	2 baik, & 1 rusak
6	Lapangan Sepak Bola	1	Dalam keadaan rusak

8. Seni

NO	SARANA	JUMLAH	KET.
1	Balai Pertemuan & Pertunjukan	2	1 baik, & 1 rusak
2	-	-	-

9. Makam : 16 buah

10. Pompa bensin : - buah

11. Jalan, Jembatan dan irigrasi

NO	SARANA	JUMLAH	KET.
1	Jalan Poros Desa	7	- Baik, 6 Rusak, 1 dlm perbaikan
2	Jalan Lingkungan	15	5 Baik, 2 Rusak, 4 dlm perbaikan
3	Jembatan Desa	11	5 Baik, 2 Rusak, 4 dlm perbaikan
4	Gorong - gorong	19	7 Baik, 9 Rusak, 3 dlm perbaikan
5	Irigasi desa	16	5 Baik, 2 Rusak, 4 dlm perbaikan
6	Tetek pintu air	17	5 Baik, 2 Rusak, 4 dlm perbaikan
7	Sumur Pantek	-	-

12. Industri dan Perdagangan

NO	JENIS	JUMLAH	KET.
1	Handycraf	-	
2	Mebelair	-	
3	Swalayan	-	
4	Besi bangunan	1	
5	Toko Kelontong	4	
6	Makanan Ringan	7	

13. Koperasi

NO	NAMA	ALAMAT	KET.
1	KUD “Gemi Tani Makmur”	Mrisen	
2	Kel.Simpan-pinjam “Manunggal”	Desa Turus	

14. Jasa

NO	JENIS	JUMLAH	KET.
1	Dokter	-	
2	Bengkel Mobil	1	
3	Bengkel Sepeda Motor	2	
4	Wartel	-	
5	Penggilingan Padi	1	
6	Fotocopy	-	
7	Pengacara	-	
8	Counter HP	1	
9	Bengkel Sepeda	1	

7. Organisasi

1. Pertanian

NO	NAMA	ALAMAT	KET.
1	Sari Rejeki	Turus Lor & Turus Kidul	135 orang
2	Tani Makmur I	Jetis & Popongan Wetan	89 orang
3	Tani Makmur II	Mrisen	65 orang

2 . P 3 A

NO	NAMA	ALAMAT	KET.
1	Mitra Tani	Desa Turus	135 orang
2	Tirta makmur	Mrisen – Jetis	154 orang

3. Sosial Masyarakat

NO	NAMA	ALAMAT	KET.
1	Karang Taruna	Desa Turus	65 orang
2	Sanggar Seni Karawitan dan Kethoprak “Ngudi Laras”	Turus Kidul	78 orang
3	Sanggar Tari “Sekar Sari Budaya”	Turus Lor	50 orang

4. Obyek Wisata

NO	NAMA	ALAMAT	KET.
1	Makam Kyai “Surayeng Kardi”	Turus Lor – Turus	Kurang Promosi
2	Makam “Nyai Dewi”	Gunungan – Turus	Kurang Promosi
3	Wisata “Kali Pleret”	Popongan Kulon - Turus	Kurang Promosi

Disamping itu ada wisata kuliner yang menyajikan berbagai makanan, yaitu :

1. Warung soto dan gorengan “Pak Tarjo”, terletak di dukuh Turus Kidul.
2. Angkringan “ Mbak Indras” terletak di dukuh Turus Kidul.
3. Warung soto dan gorengan “Pak Kadi”, terletak di dukuh Jetis.
4. Warung Soto “ Pak Wiji” yang terletak di Prapatan Jetis.
5. Warung Bakso “Pak Tino” yang terletak di Prapatan Selorejo.
6. Warung Lotek “ Pak Umar “yang terletak di Popongan Wetan.
7. Angkringan “Pak Mursidi” yang terletak di Mrisen.
8. Warung Makan “ Bu Sri” yang terletak di Mrisen.
9. Warung Jus dan Ketoprak “ Bu Mia” yang terletak di Mrisen.
10. Warung Makan “Sor Pelem” yang terletak di Mrisen.
11. Dawet Ayu “ Pak Widodo “ yang terletak di Mrisen.
12. Warung Soto “ Bu Jami “ yang terletak di Mrisen.

5. Stakeholder

1. PKK dan Kelompok Perempuan
2. BUMDes
3. Tokoh Masyarakat
4. Kelompok Petani : Sari Rejeki
5. P3A : Tani Rukun
6. Pengusaha (Tebasan, jasa angkutan referansir dll.)
7. Pedagang : Pedagang Kelontong, Ternak (sapi, kambing, itik).
8. PNS / ABRI,
9. Buruh : terdiri dari buruh pertanian, buruh pabrik tekstil dan buruh bangunan
10. Perangkat Desa dan Lembaga LPMD
11. RW dan RT (4 RW dan 11 RT)
12. LPM
13. Karang Taruna
14. BPD
15. Kelompok Seni (Karawitan, Seni Tari, Dekorasi, dan sandiwara Kethoprak)

8. Potensi Strategis

Desa Turus merupakan salah satu desa perbatasan yang dilalui jalan lintas Kota Kecamatan yang menghubungkan Kec.Polanharjo dengan Kec.Delanggu. Desa Turus terletak disebelah selatan pusat kota Kecamatan Polanharjo, berupa desa hamparan yang memiliki berbagai macam potensi alam yang kaya akan budaya. Selain itu, Desa Turus merupakan salah satu daerah pertanian penghasil beras di Kabupaten Klaten. Berikut beberapa potensi Desa Turus.

1. Merupakan lintasan Lalu lintas yang menghubungkan (Kec.polanharjo – Kec.Delanggu)
2. Potensi Wisata kesenian Karawitan, Wayang orang dan seni Ketoprak.
3. Kawasan Perbatasan
4. Kawasan Industri
5. Kawasan Pusat Pertumbuhan
6. Potensi Lahan Pertanian

9. Kondisi Sarana dan Prasarana.

Desa Turus walaupun lingkungannya pedesaan, tetapi sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Sarana transportasi umum yang berupa jalan, sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Sarana jalan ini sedemikian banyaknya, sehingga beberapa ruas diantaranya hampir tidak dapat dipelihara dengan baik, karena terbatasnya anggaran yang ada. Dimulai dari Jalan Poros, Jalan Lingkungan, Jalan / Lorong Dukuh dan jalan kecil lainnya, semuanya sudah tersedia. Dengan sedemikian luas / banyak sarana jalan ini, tentunya memudahkan perhubungan, tetapi sangat memberatkan pemeliharaannya. Dahulu sebelum kemerdekaan, pada saat dibuat jalan-jalan ini hampir hanya dilewati oleh para pejalan kaki, karena masih sedikitnya kendaraan. Umumnya pejalan kaki ini pada umumnya selalu mencari jalan pintas, untuk menghemat waktu dan tenaga. Dengan kemajuan jaman, sekarang sudah banyak kendaraan, mulai dari sepeda sampai kendaraan bermotor roda 4, bahkan truk, yang dimiliki oleh masyarakat. Menggunakan kendaraan ini para pemakai jalan tidak berkeberatan untuk menempuh jalan yang lebih jauh, tetapi lebih nyaman. Konsekuensinya mereka hanya menggunakan jalan yang sudah diaspal saja, walaupun jarak tempuh lebih jauh. Berhubung jalan yang sudah diaspal terbatas, maka jalan yang belum diaspal, apalagi jalan tanah, hampir tidak pernah dilewati, sehingga dipenuhi tumbuhan gulma dan rumput.

Di Desa Turus juga sudah ada prasarana listrik yang mencukupi. Listrik dari PLN sudah memasok dayanya dengan tegangan yang relatif stabil, sehingga para pemakainya tidak terlalu dirugikan akibat fluktuasi tegangannya. Hampir seluruh bangunan, mulai dari Kantor dan Balai Desa, rumah tinggal dan rumah ibadah, bangunan umum, dll., sudah dialiri listrik. Jalan-jalan

dilingkungan pemukiman dan sudut-sudut jalan juga sudah diterangi dengan lampu listrik. Pemanfaatan listrik juga nampak dari penggunaan pompa-pompa air dirumah-rumah, untuk menyalakan televisi, radio, lemari pendingin (refrigerator), mesin cuci, alat-alat rumah tangga dan alat dapur lainnya. Bahkan ada yang sudah menggunakannya sebagai penggerak sarana produksi di industri rumah tangga.

Sarana irigasi yang ada di wilayah Desa Turus sudah sangat maju dan air dapat diperoleh sepanjang tahun. Hal ini sangat menunjang pertanian, yang menjadi mata pencaharian pokok warga disini.

Pada saat ini warga Desa Turus sudah memiliki sambungan air bersih / minum, walaupun masih dalam taraf pengembangan. Moga-moga dimasa mendatang warga Desa Turus juga dapat menikmati sarana air ini secara menyeluruh, sehingga tidak tergantung pada air sumur yang mutunya tidak sebgus air dari sumber mata air.

Sarana telekomunikasi juga sangat menyebar, baik sarana telepon rumah dari PT Telkom, maupun telepon selular. Dengan adanya jaringan telepon dari PT Telkom, maka warga dapat mengakses internet dengan biaya murah, sehingga telekomunikasi dan pertukaran / akses informasi dapat dilakukan dengan cepat dan murah.

Saat ini sudah ada beberapa menara pemancar telepon selular didekat Desa Turus, sehingga sinyal telepon cukup baik dan memudahkan perhubungan dengan menggunakan alat ini. Disamping itu sinyal yang dipancarkan dari pemancar-pemancar studio televisi juga cukup kuat, sehingga acara-acara televisi yang berupa informasi, pendidikan dan hiburan dapat dinikmati dengan baik.

Sarana transportasi umum, yang berupa kendaraan "ANGKUDES " memang belum ada yang memiliki jalur (route) yang melewati jalan-jalan di Desa Turus. Walaupun demikian 1 jalur yang melewati sisi sebelah utara (jalur Delanggu – Tulung - Ngangkruk) dan 1 jalur disisi sebelah selatan (jalur Delanggu - Jatinom) bersinggungan dengan batas Desa Turus, sehingga warga desa tidak kesulitan untuk mencari sarana angkutan yang diperlukan. Dan dengan makin banyaknya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh warga sendiri, maka kendala yang ada di bidang transportasi hampir semua dapat diatasi, kecuali kondisi jalan yang buruk.

10. Gambaran Kondisi Kemiskinan Desa Turus

Kemiskinan di Desa Turus memang masih banyak. Kalau tingkat kemiskinannya sampai 42.13 %, maka ini memang merupakan suatu potret yang menakutkan, karena kemiskinan akan mempengaruhi keadaan masyarakat kita. Hampir segala bidang akan terpengaruh. Contohnya di bidang keamanan, dengan keadaan miskin ini, maka akan mendorong orang untuk berusaha

menambah pemasukannya dengan cara apapun, kalau perlu dengan melanggar hukum atau mengambil hak orang lain.

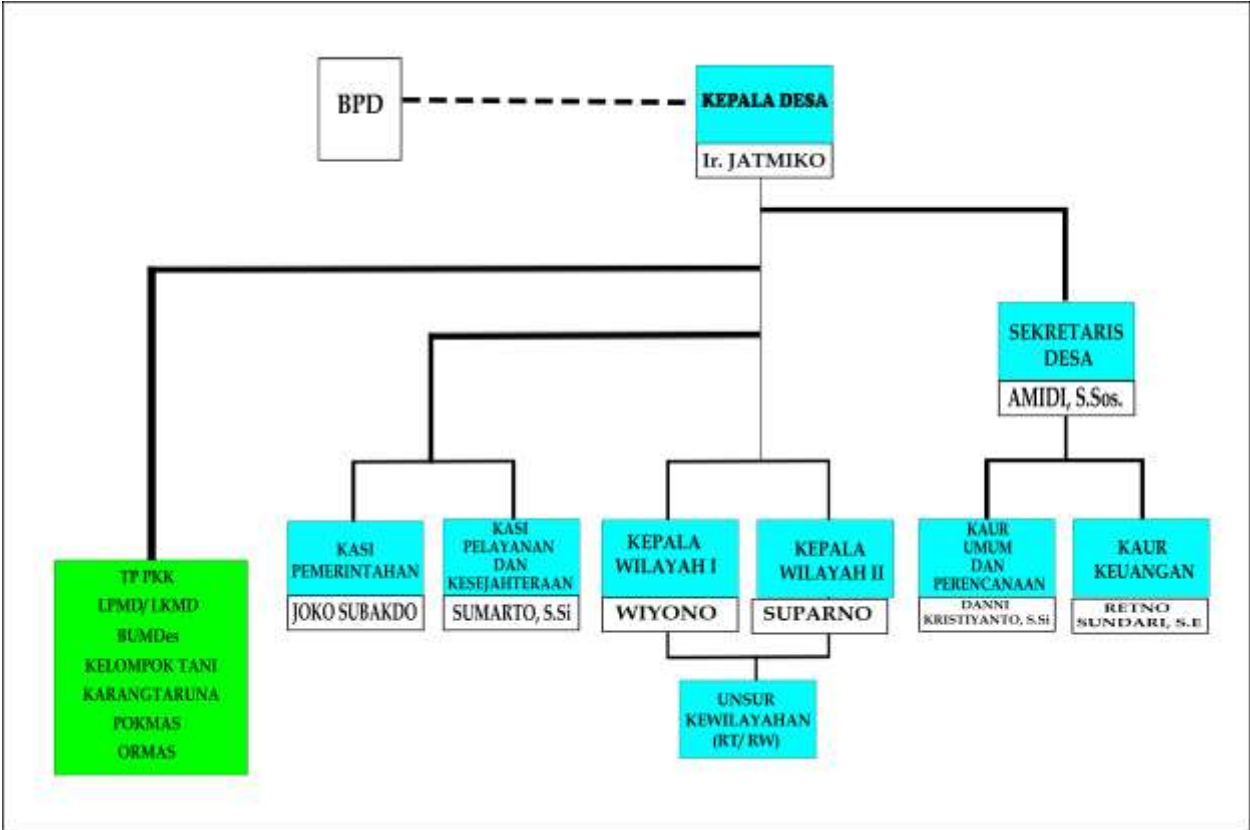
Dibidang sosial, akan terjadi penurunan dari kegiatan sosial, karena warga akan sibuk mencari tambahan pemasukan untuk keluarganya dan mengesampingkan keinginan ”membantu” anggota warga yang lain, yang saat itu membutuhkan bantuan. Dan kalau bantuan itu dapat diberikan, sifatnya hanya bantuan tenaga dan rasa simpati saja, karena dia tidak mempunyai harta atau benda yang diperlukan tetangganya. Dibidang pendidikan, bagaimana akan dapat menyekolahkan anaknya sampai jenjang yang tinggi, kalau untuk memenuhi kebutuhan pokok saja masih harus bergulat dari hari ke hari. Dibidang keagamaan, dia harus lebih sering absen, karena harus selalu bergerak mencari nafkah.

Dari gambaran diatas dapat dilihat bagaimana kemiskinan ini mempengaruhi hampir seluruh bidang kehidupan. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk segera mengentaskan kemiskinan ini dari lingkungan kita. Mengentaskan kemiskinan ini jangan dengan cara ” instant ”, yang mengejar target, tetapi mengajak mereka mencari jalan keluar agar secara bertahap, dan atas usaha sendiri, dapat keluar dari kemiskinan ini, disamping usaha memberikan bantuan yang mendidik. Bantuan-bantuan yang berupa uang atau barang sebaiknya hanya diberikan karena sifatnya darurat dan segera diubah bila keadaan darurat itu sudah diatasi. Kalau bantuan yang bersifat darurat itu diteruskan, akan membuat masyarakat menjadi pemalas, karena tanpa usaha sudah mendapat kebutuhan secara langsung. Masyarakat perlu diberi ” kail ” dan umpan, jangan ikannya yang tinggal dimasak.

Dibidang ketrampilan masih perlu ditingkatkan dan diperluas. Ketrampilan ini yang dapat diberikan dapat mencakup segala bidang. Tujuannya sudah jelas : agar mereka yang saat ini masih sering kalah dalam persaingan memperebutkan lapangan kerja, nantinya dapat menjadi pemenang. Mereka masih banyak yang belum menyadari, bahwa makin banyak lapangan kerja yang terbuka. Sudah siapkah mereka? Dan cukupkah ketrampilan yang sudah mereka miliki untuk bersaing dengan rekan-rekan lainnya dari kota? Bersaing bukan hanya ketrampilan dibidang pertukangan dan pembangunan, tetapi juga dibidang produksi.

C. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Turus Nomor 3 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Turus Kecamatan Polanharjo sebagai berikut.



Berdasarkan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa tersebut di atas, maka tugas-pokok fungsi masing-masing kelembagaan sebagai berikut.

1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. BPD dibentuk berdasarkan usulan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan.

a. Tugas BPD

BPD memiliki tugas sebagai berikut.

- 1) mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- 2) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3) mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- 5) menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- 6) menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 7) menyelenggarakan musyawarah BPD;
- 8) menyelenggarakan musyawarah Desa;
- 9) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- 10) menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- 11) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 12) melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja Pemerintah Desa;
- 13) melakukan evaluasi LKPPD;
- 14) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya;
- 15) menyusun Peraturan Tata Tertib BPD;
- 16) menyampaikan laporan hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- 17) menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa;

- 18) mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan biaya operasional BPD; dan
- 19) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi BPD

BPD memiliki fungsi sebagai berikut.

- 1) pelaksanaan pembahasan dan pemberian persetujuan bersama Kepala Desa atas rancangan Peraturan Desa;
- 2) pelaksanaan penggalan, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) pelaksanaan pengawasan kinerja Pemerintah Desa.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Turus terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (yang terdiri dari Kepala Urusan Umum dan perencanaan dan Kepala Urusan Keuangan), Kepala Seksi (terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan), dan Kepala Wilayah (yang terdiri dari Kepala Wilayah I dan Kepala Wilayah II). Dari masing-masing unsur pemerintahan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Berdasar Keputusan Kepala Desa Turus Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Nomor 140/ 017 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa sebagai berikut.

a. Kepala Desa

- 1) Kedudukan dan Tugas :
 - a) Berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b) Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2) Fungsi:

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
- b) Melaksanakan pembangunan,
- c) Pembinaan kemasyarakatan,
- d) Pemberdayaan masyarakat,
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

b. Sekretaris Desa

1) Kedudukan dan Tugas :

- a) Berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- b) Bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

2) Fungsi:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan

1) Kedudukan dan Tugas :

- a) Berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- b) Bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

2) Fungsi :

- a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Kepala Seksi

1) Kedudukan dan Tugas :

- a) Berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- b) Bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

2) Fungsi :

- a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

e. Kepala Wilayah

1) Kedudukan dan Tugas :

- a) Berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan
- b) Bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

2) Fungsi :

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, selamat Bekerja.

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

A. Sosialisasi

Sosialisasi RPJM Desa dilakukan di tiap RW dan RT diseluruh Desa Turus. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui pertemuan-pertemuan RW dan RT. Sosialisasi dilakukan dari tanggal 30 Juni 2019 – 10 Juli 2019.

B. Musdus

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDesa) dimulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Desa Turus dengan menggunakan alat :

- 1. Sketsa Desa;
- 2. Kalender Musim; dan
- 3. Diagram Kelembagaan.

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum Musyawarah Dusun yang dilakukan pada :

No	Dusun	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1.	Dusun I	Hari Selasa, 16 Juli 2019	MIM Mrisen
2.	Dusun II	Hari Rabu, 17 Juli 2019	Balai Tegal Ketos

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat dusun, kemudian dituangkan ke dalam lampiran.

C. Lokakarya Desa

Proses penyusunan program dan kegiatan selanjutnya dilakukan dalam Lokakarya di tingkat desa yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2019 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasi dan mengelompokkan masalah-masalah serta potensi dari hasil Musyawarah Dusun;
2. Menyusun Legenda dan sejarah desa;
3. Membuat skala prioritas. Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan.
4. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah. Setelah seluruh masalah dirangking berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama, maka tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
5. Menetapkan tindakan yang layak Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini dipisahkan juga antara pembangunan skala desa dan pembangunan skala kabupaten.

D. Musyawarah Desa

Draft RPJMDesa yang sudah direvisi dalam forum Musrenbang Desa kemudian ditetapkan Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Turus Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

E. MUSRENBANG RPJM DESA

Berdasarkan Lokakarya Desa Perencanaan Partisipatif, hasil yang dicapai masih berupa draft Dokumen RPJMDesa, maka oleh Tim Perencana Desa kemudian dikonsultasikan kepada publik melalui Musrenbang Desa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2019 untuk mendapatkan tanggapan atau masukan dari masyarakat serta narasumber. Usulan atau masukan dari masyarakat yang disetujui oleh forum Musrenbangdesa akan ditambahkan dalam Dokumen RPJMDesa.

BAB IV

VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. Visi

Visi Desa Turus **“MENCIPTAKAN DESA TURUS YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA SERTA RELIGIUS MASYARAKATNYA”** dengan kata lain *“Bersama dengan masyarakat bertekad untuk memajukan Desa Turus yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang serta menciptakan susana aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan ajaran agama yang dianut dan menjalin kerukunan hidup antar umat beragama”*.

B. Misi

Visi dapat tercapai melalui suatu misi yang harus dilaksanakan. Berikut misi yang akan dilakukan dalam mencapai visi Desa Turus.

1. Menciptakan pemerintah desa yang cepat dan tanggap terhadap keadaan dan aspirasi masyarakat dengan terjun langsung melihat kondisi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Koordinasi dan bekerjasama dengan semua unsur kelembagaan desa, supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang : ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban dan keamanan masyarakat.
4. Mengembangkan dan memberdayakan potensi masyarakat yang berorientasi kewirausahaan untuk meningkatkan kesejahteraan.
5. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana di wilayah Desa Turus.
6. Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahkan jaminan kesehatan melalui program pemerintah.

7. Meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan supremasi hukum.
8. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Turus.
9. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menanamkan nilai-nilai luhur keagamaan.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Berdasarkan jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan beberapa kali pertemuan, kemudian diolah oleh tim penyusun RPJM Desa Turus, maka kebijakan pembangunan akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan.

1. Strategi kebijakan program kerja 6 tahun:

a. Bidang Pemerintahan

Di bidang pemerintah desa membangun Birokrasi dan Kelembagaan lebih maju dan professional. Berikut program dalam bidang pemerintah desa.

- 1) Menciptakan aparatur desa yang profesional, sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, jujur, transparan, dan amanah serta bersih dari KKN.
- 2) Menciptakan pelayanan pemerintah yang prima, membuat data dan status kependudukan serta asset yang oleh setiap anggota masyarakat menjadi jelas.
- 3) Memperdayakan semua unsur lembaga yang terkait dengan pemerintah desa.
- 4) Meningkatkan dan memfungsikan hubungan antara aparat pemerintahan desa dengan pengurus RT/ RW serta tokoh-tokoh masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis dan sesuai dalam merencanakan pembangunan desa.
- 5) Menjaga kedamaian, ketentraman, dan kerjasama yang konstruktif antara Aparat Pemerintah Desa dengan BPD dan TPK.

b. Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Berikut program kerja dalam meningkatkan perekonomian.

- 1) Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi masyarakat yang berorientasi kewirausahaan yang diarahkan untuk membangun ekonomi masyarakat guna menciptakan masyarakat yang sejahtera, sehat, berpendidikan, dan produktif.

- 2) Merencanakan secara berkelanjutan program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sarana prasarana yang menunjang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab.
- 3) Meningkatkan hasil pertanian masyarakat dengan mengaktifkan kelompok-kelompok tani, memperbaiki saluran-saluran perairan serta kerjasama dengan penyuluh pertanian.

c. Bidang Pembangunan

Dalam bidang pembangunan bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat pada fasilitas-fasilitas umum. Selain itu, di bidang pembangunan diharapkan dapat menunjang perekonomian, sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat. Berikut program-program dalam bidang pembangunan.

- 1) Melakukan pembangunan jalan guna meningkatkan hasil pertanian masyarakat dan menekan biaya angkut hasil pertanian.
- 2) Membangun talud jalan agar sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan.
- 3) Membangun dan memperbaiki saluran irigasi.
- 4) Membuat rabat beton pada jalan-jalan yang bertanah becek.

d. Bidang Sosial, Budaya, dan Masyarakat

Di bidang sosial, budaya, dan masyarakat menitikberatkan pada penggalan potensi lokal masyarakat Desa Turus dan fungsi pelayanan masyarakat dan pelestarian seni budaya. Meningkatnya bidang sosial, budaya, dan masyarakat, sehingga kearifan lokal masyarakat Desa Turus meningkat dan tidak punah oleh perkembangan jaman. Berikut program-program dalam bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan.

- 1) Menciptakan suasana kedamaian dan jiwa gotong royong serta saling menghormati pada setiap anggota masyarakat.
- 2) Mengaktifkan kegiatan PKK ditingkat desa sampai tingkat dukuh dengan kegiatan yang bermanfaat, sehingga warga masyarakat saling berinteraksi dan bekerjasama dalam kegiatan kemasyarakatan seperti posyandu balita, posyandu remaja, posyandu lansia, dan senam sehat.
- 3) Mengaktifkan organisasi Karang Taruna sebagai sarana menyalurkan dan mengembangkan bakat, minat dan kreatifitas pemuda dalam kegiatan positif, seperti keagamaan, kewirausahaan, dan olahraga.

- 4) Pembinaan kinerja RT dan RW agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang nanti muncul di lingkungan masyarakat.
- 5) Melestarikan dan membina budaya yang telah ada seperti karawitan, wayang orang, qosidah dan sholawatan serta menggali dan mengembangkan potensi kebudayaan yang berkembang dimasyarakat.

e. Bidang agama

Dalam bidang agama bertujuan membangkitkan semangat masyarakat untuk senantiasa mendekatkan diri pada Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut. Berikut program-program dalam bidang agama.

- 1) Mengadakan peringatan-peringatan hari besar.
- 2) Mewujudkan masyarakat yang saling menghormati antar agama.
- 3) Mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan TPA disetiap dukuh di Desa Turus.
- 4) Memakmurkan masjid di lingkungan Desa Turus.

f. Bidang pertahanan dan keamanan (HANKAM)

Bidang pertahanan dan keamanan bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat. Masyarakat tidak takut kehilangan harta benda pada saat meninggalkan rumah untuk bekerja mencari nafkah atau kegiatan lainnya. Berikut program-program dibidang HANKAM.

- 1) Meningkatkan kegiatan siskamling dan kewaspadaan terhadap tidak kriminal serta kejahatan lainnya.
- 2) Membina warga supaya tertib dan berperan aktif menciptakan ketentraman dan keamanan lingkungan.
- 3) Wajib lapor bagi tamu/ penduduk dari luar daerah 1 x 24 jam.
- 4) Mengadakan koordinasi antara panitia penyelenggara, aparat desa dan aparat kepolisian setiap ada pertunjukan/ hiburan di desa.

2. Program Unggulan

Selain program kerja enam tahun, Desa Turus juga memiliki program unggulan yang hendak dicapai. Program-program unggulan ini juga memiliki tujuan yang sama seperti program kerja enam tahun, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Program kerja unggulan tercantum sebagai berikut.

a. Pohon sejahtera

Memanfaatkan semua bahu jalan yang tersedia di Desa turus, untuk ditanami dengan pohon-pohon produktif yang dikelola secara kerjasama dan dipasarkan hasilnya guna dipakai untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Sayuran organik

Memanfaatkan lahan yang tersedia di setiap pekarangan rumah untuk ditanami dengan sayur mayur dan umbi-umbian dengan menggunakan pupuk organik. Yang hasilnya selain dikonsumsi sehari-hari juga dipasarkan untuk menambah pendapatan masing-masing keluarga.

c. Orang tua asuh

Mengumpulkan dana dari para donator untuk menyantuni anak yatim piatu dan memberikan beasiswa kepada para pelajar yang berprestasi.

d. Program HBS (Hijau, Bersih, dan Sehat)

Melakukan penghijauan dengan program 1 rumah 1 pohon peneduh dan bergotong royong untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan melakukan kegiatan olahraga secara rutin.

e. Pelayanan Administrasi Terintegrasi

Memberikan pelayanan administrasi pada masyarakat dengan sistem 1 meja guna memberikan kemudahan dan suasana yang lebih ramah dan lebih cepat.

D. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Arah kebijakan keuangan Desa Turus, berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). Selain itu juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dari peraturan tersebut, maka pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam suatu sistem anggaran dan pendapatan Desa (APBDes) yang mencakup pengelolaan terhadap Pos-pos APBDes serta laporan pelaksanaan APBDes secara umum. Terkait dengan RPJMDes, maka kebijakan APBDes merupakan komponen penyelenggaraan pemerintah desa untuk mendanai program dan kegiatan selama kurun waktu 6 (enam) tahun ke depan. Arah belanja APBDes akan digunakan sepenuhnya untuk mendukung program prioritas strategis jangka menengah.

Untuk menjamin ketersediaan dana, kebijakan pendapatan desa diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Komponen APBDes akan dirinci berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

1. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pengelolaan Pendapatan Desa

Perkembangan Pendapatan Desa Tahun 2017-2019

No	Uraian Pos Pendapatan	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)			
	a. Tanah Kas Desa	37,850,000	15,750,000	26,000,000
	b. Hasil Bengkok Tanah Kas Desa	75,600,000	82,800,000	82,800,000
	c. Laba BUMDes	-	1,500,000	1,500,000
	d. Pendapatan Bunga Bank/Jasa Giro	1,500,000	-	2,000,000
	e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah Lainnya	-	-	-
2	Pendapatan Transfer			
	a. Dana Desa	778,793,000	720,472,000	823,512,000
	b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	23,751,550	23,177,638	26,895,163
	c. Alokasi Dana Desa	338,181,000	334,209,000	325,145,000
	d. Bantuan Keuangan Provinsi	235,000,000	55,000,000	55,000,000
	e. Bantuan Keuangan Kabupaten	100,000,000	92,000,000	239,312,500
3	Pendapatan Lain-lain			
	a. Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	1,600,000	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		1,642,275,550	1,374,908,638	1,632,164,663

b. Pengelolaan Belanja Desa

No	Uraian Pos Belanja	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	696,109,632	507,363,104	524,901,096
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1,014,094,750	709,609,000	1,030,150,200
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	19,185,250	28,494,250	36,260,800
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	233,299,750	230,411,000	70,787,000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	1,810,805	1,870,000	3,075,268
JUMLAH BELANJA		1,964,500,187	1,477,747,354	1,665,174,364

Perkembangan Belanja Desa Tahun 2017-2019

c. Pengelolaan Pembiayaan Desa

Perkembangan Belanja Desa Tahun 2017-2019

No	Uraian Pos Belanja	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penerimaan Pembiayaan			
	a. Silpa Tahun Lalu	1,061,432	-	-
	b. Silpa PAD	12,810,954	17,313,430	14,294,298
	c. Silpa Dana Desa	-	57,678,000	5,023,000
	d. Silpa BHPRD Kab./Kota	780,880	2,877,841	1,909,138
	e. Silpa Alokasi Dana Desa	582,500	40,888,640	11,572,460
	f. Silpa Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
	g. Silpa Bantuan Keuangan Kabupaten	-		-
	h. Silpa Pendapatan Lain-lain	210,805	210,805	210,805
	i. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
	j. Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	-	-	-
JUMLAH		15,446,571	118,968,716	33,009,701

2	Pengeluaran Pembiayaan			
	a. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	b. Penyertaan Modal BUMDes	50,000,000	20,000,000	-
	JUMLAH	50,000,000	20,000,000	-
	JUMLAH (PENERIMAAN - PENGELUARAN)	(34,553,429)	98,968,716	33,009,701

d. Analisa Kemampuan Keuangan Desa

Roda Perekonomian terletak pada sector Pertanian Target PAD tidak tercapai disebabkan Pad Murni belum dikelola dengan baik masih banyak pendapatan desa yang tidak realisasi. Langkah –langkah yang akan dilakukan adalah pengelolaan PAD harus lebih ditingkatkan pengawasannya dan menunjuk pembantu Bendahara desa untuk mengelola secara khusus dengan membuat Buku Kas pembantu disetor setiap bulan pada bendahara. Upaya lain yang dilakukan adalah berusaha untuk menggali sektor penerimaan PAD yang belum masuk menjadi sumber pendapatan atau penerimaan.

BAB V

PENUTUP

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT, atas terselesainya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Turus, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten untuk Tahun 2019-2025. RPJM-Desa Turus merupakan akumulasi serta sumbangsih dari seluruh elemen masyarakat Desa Turus, Kecamatan Polanharjo secara umum. Dengan satu harapan Desa Turus selama 6 (enam) tahun mempunyai acuan serta rambu-rambu yang jelas dalam bidang pembangunan desa.

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini, tidak lepas dari kerja keras semua pihak dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga melahirkan sebuah rencana yang sesuai dengan kondisi Desa secara sistematis dan terukur serta merepresentasikan keinginan dan harapan masyarakat Desa Turus. Untuk itu Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada semua pihak.

Tentunya RPJM-Desa ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya sehingga masih perlu sumbang saran, pemikiran serta masukan dari semua pihak agar lebih sempurnanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Turus ini.

Turus,

Kepala Desa Turus

Ir. Jatmiko

LAMPIRAN-LAMPIRAN